

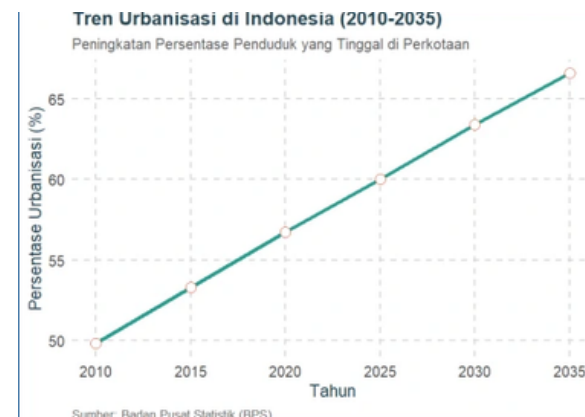
BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Urbanisasi di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan, didorong oleh migrasi besar-besaran ke kota-kota besar di Indonesia. Grafik ini menggambarkan peningkatan pesat persentase penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dari tahun 2010 hingga proyeksi tahun 2035. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025, sekitar 60% populasi Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, meningkat signifikan dibandingkan 56,7% pada tahun 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035. Pada tahun 2045, seratus tahun kemerdekaannya, sekitar 220 juta orang atau lebih dari 70% populasi akan tinggal di perkotaan.



Gambar 1.1. Tren urbanisasi di Indonesia
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)



Gambar 1.2. Urbanisasi di Indonesia
Sumber : indosiana.id

Urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan hunian meningkat. Akibatnya, pembangunan permukiman yang semakin masif turut meningkatkan kepadatan ruang perkotaan. Kondisi permukiman yang padat dapat menurunkan kualitas lingkungan serta menciptakan kondisi hunian yang kurang sehat (Grahamedia, 2024). Kondisi ini juga memicu masalah lain seperti banjir dan polusi akibat dari pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan terpadu. Permasalahan sosial berupa kemiskinan juga menjadi salah satu dampak urbanisasi yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan (Harahap, 2013). Akibatnya, kelompok miskin terpaksa membangun tempat tinggal di area yang seharusnya bukan untuk permukiman, seperti bantaran sungai atau pinggiran rel kereta. Hunian yang mereka dirikan pun beragam, dari gubuk sederhana berbahan tidak tahan lama hingga rumah permanen, yang lama-kelamaan membentuk kawasan kumuh (Noveria, 2010). Menurut Komaruddin (1997, dalam Kompasiana), tingginya arus urbanisasi dan migrasi, khususnya yang berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya permukiman kumuh. Selain itu laju urbanisasi dan ekspansi kota tidak hanya mempersempit ruang untuk permukiman, tetapi juga mengurangi ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data dari pertanian.go.id laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sekitar 102.000 ha/tahun. Hal ini berakibat pada ketersediaan pangan perkotaan. Ketika stok pangan sedikit maka harga pangan semakin tinggi yang menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam mengakses kebutuhan pangan (Ashar dan Damanik, 2021).



Gambar 1.3. Alih Fungsi Lahan Pertanian
Sumber : tempo.com



Gambar 1.4. Kawasan Kumuh
Sumber : Kompasiana.com

Fenomena urbanisasi di kota Surabaya

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang terletak di Jawa Timur. Sebagai kota metropolitan Kota Surabaya menjadi magnet bagi berbagai wilayah di Indonesia. Urbanisasi di Surabaya didorong oleh faktor ekonomi, seperti peluang kerja yang lebih baik, serta faktor pendidikan. Berdasarkan data dari databoks lima tahun terakhir jumlah populasi kota Surabaya menunjukkan tren yang terus meningkat. Peningkatan populasi penduduk menjadi sebuah tantangan bagi kota Surabaya.



Gambar 1.5. Jumlah Penduduk
Sumber : databoks.katadata.co.id

Surabaya sebagai Salah Satu Kota Urbanisasi Terbesar di Indonesia



Gambar 1.6. Kota Surabaya
Sumber : Kompaspedia.com

Dampak urbanisasi terhadap permukiman kota Surabaya

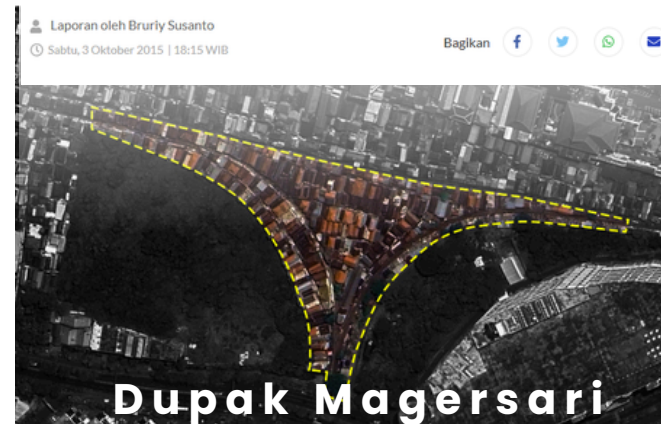
Urbanisasi yang tidak terkendali memicu munculnya permukiman kumuh di kota Surabaya. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menyatakan bahwa luas kawasan kumuh di Kota Pahlawan tinggal 43,46 hektare pada 2019. Kawasan kumuh berdampak langsung pada kualitas hidup penghuninya. Kondisi lingkungan yang padat, minim sanitasi, dan kurang pencahayaan alami memicu berbagai masalah terutama masalah kesehatan. Menurut RDTRK Unit Pengembangan VI Tunjungan (2011, dalam Barbara & Umilia, 2014), kawasan pusat kota Surabaya memiliki banyak fenomena permukiman kumuh (slum) dengan karakteristik hunian padat, memiliki KDB 80-100%, GSB 0-3 meter, dan KDH 0-10%. Dalam survei yang dilakukan oleh Barbara dan Umilia, 2014 terdapat beberapa area kumuh di kawasan pusat Surabaya seperti Dupak Magersari.

Dupak Magersari- Permukiman Kumuh di Kota Surabaya

Dupak Magersari merupakan sebuah permukiman informal yang terletak di Kel. Jepara, Kota Surabaya. Permukiman dengan luas 0,8 Ha ini terdiri dari 378 bangunan (Pujayanti dkk, 2023). Pertumbuhan hunian pada kampung tersebut mengikuti jalur kereta api, yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan permukiman. Sebagian besar warga tinggal di hunian yang kotor dan tidak memenuhi standar kesehatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan ruang yang tidak didukung oleh luas lahan, sehingga penataan interior menjadi kurang maksimal. Selain itu hunian juga kurang didukung sirkulasi udara yang baik, akibat minimnya bukaan pada rumah dan kesalahan penggunaan material (Atika, 2020). Status kepemilikan lahan permukiman masih menjadi milik PT. KAI.

Pemkot Klaim Kawasan Kumuh di Surabaya Tinggal 43 Hektare

PT KA Tunggu Kebijakan Pemkot Merelokasi Rumah di Rel Dupak Magersari



Gambar 1.7. Tampak Atas Kampung Dupak Magersari
Sumber : Dokumen Pribadi, 2026

Analisis Faktor Penyebab Terbentuknya Permukiman Kumuh di Kota Surabaya: Dampak Urbanisasi dan Kemiskinan



Gambar 1.8. Kampung Dupak Magersari
Sumber : Kempalan.com

Dampak lain urbanisasi

Selain berdampak pada kondisi hunian, pesatnya urbanisasi juga memperluas tekanan spasial kota, menggeser lahan produktif di pinggiran menjadi kawasan terbangun. Provinsi Jatim sebagai konteks regional mengalami alih fungsi lahan mencapai 1000 ha per tahun (radar surabaya, 2023). Hal ini berdampak pada berkurangnya produksi pangan yang mengancam ketahanan pangan kota. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah rentan pada krisis pangan karena penghasilan tidak sebanding dengan biaya hidup. Oleh karena itu perlunya upaya penanganan terhadap masalah ketahanan pangan.

Angka Alih Fungsi Lahan di Jatim Capai 1.000 Hektare Per Tahun



Gambar 1.9. Alih Fungsi Lahan Pertanian
Sumber : matanurani.com

Lahan Pertanian Terus Berkurang, Pemkot Surabaya Fokus Jaga Kestabilan Pangan dengan Cara Ini



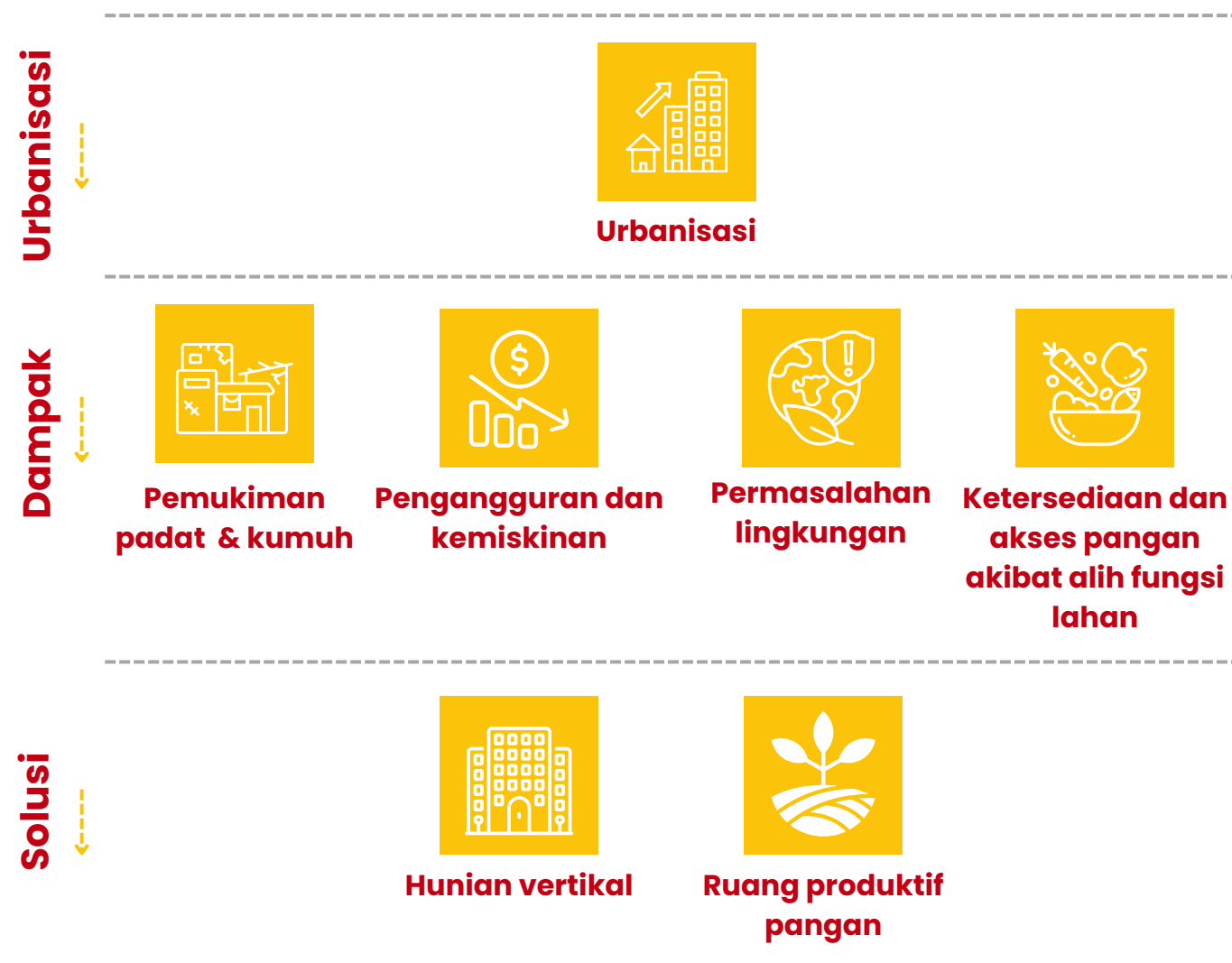
Gambar 1.10. Urban Farm
Sumber :

Bagaimana Kampung Vertikal Tahan Pangan dapat menyelesaikan permasalahan akibat dari urbanisasi?

Kampung Vertikal Tahan Pangan hadir sebagai respon arsitektural terhadap dampak urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk dan berkurangnya lahan permukiman di kota besar seperti Surabaya. Dengan konsep vertikal, kampung ini mengoptimalkan penggunaan lahan terbatas melalui hunian bertingkat yang tetap mempertahankan nilai sosial khas kampung. Kampung vertikal ini berangkat dari kebutuhan relokasi warga yang saat ini bermukim di kawasan yang tidak sesuai peruntukan tata ruang kota yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuni dan juga kondisi bangunan yang tidak layak huni.

Selain menyelesaikan persoalan kepadatan, kampung vertikal ini juga menjawab tantangan ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan pertanian di wilayah urban melalui integrasi sistem pertanian perkotaan ke dalam hunian vertikal. Integrasi pertanian perkotaan tidak hanya menyelesaikan masalah pangan tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kampung Dupak Magersari.

Kerangka solusi

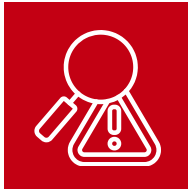


Bagaimana Kampung Vertikal Tahan Pangan dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)?

Kampung Vertikal Tahan Pangan hadir sebagai respon arsitektural terhadap dampak urbanisasi yang menyebabkan kepadatan penduduk dan berkurangnya lahan permukiman di kota besar seperti Surabaya. Dengan konsep vertikal, kampung ini mengoptimalkan penggunaan lahan terbatas melalui hunian bertingkat yang tetap mempertahankan nilai sosial khas kampung.

SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Terdapat beberapa poin SDGs yang dicapai dalam perancangan Kampung Vertikal Tahan Pangan, diantaranya :

1 NO POVERTY  1.2	Kampung Vertikal Tahan Pangan menghadirkan hunian layak berbasis ketahanan pangan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui integrasi kegiatan pertanian produktif di lingkungan tempat tinggal mereka.
2 ZERO HUNGER  2.1	Mengintegrasikan sistem pertanian perkotaan berkelanjutan seperti kebun vertikal dan hidroponik untuk mendukung ketersediaan pangan lokal, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan eksternal.
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH  8.3	Kampung Vertikal Tahan Pangan mendorong kegiatan ekonomi produktif berbasis komunitas melalui pengelolaan kebun bersama, usaha mikro pangan lokal, dan kegiatan wirausaha rumah tangga yang memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah.
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES  11.1	Kampung Vertikal Tahan Pangan menghadirkan hunian layak dan berkelanjutan di kawasan padat perkotaan melalui konsep vertikal yang efisien lahan, ramah lingkungan, dan tetap mempertahankan karakter sosial khas kampung.



1.2 Identifikasi Masalah

1. Kepadatan permukiman dan keterbatasan lahan akibat urbanisasi yang pesat
2. Munculnya permukiman kumuh
3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman berdampak pada berkurangnya lahan produksi pangan menyebabkan kerentanan terhadap ketahanan pangan kota akibatnya akses pangan yang susah terutama masyarakat miskin kota.



1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang kampung vertikal di kawasan perkotaan padat Surabaya dapat menciptakan hunian yang layak tanpa menghilangkan karakter sosial dan budaya masyarakat kampung Dupak Magersari dan juga dapat menjadi lingkungan hunian yang produktif melalui integrasi sistem pertanian kota untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat?



1.4 Tujuan Perancangan

Merancang kampung vertikal sebagai upaya perbaikan kualitas permukiman kumuh dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat kampung di Kota Surabaya melalui integrasi pertanian perkotaan.



1.5 Manfaat Perancangan

- Manfaat teoritis

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan arsitektur, khususnya dalam kajian perumahan vertikal berkelanjutan di kawasan padat perkotaan.

- Manfaat praktis

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan alternatif rancangan hunian vertikal bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh ditengah lahan yang semakin terbatas.



1.6 Batasan Perancangan

Integrasi ketahanan pangan dibatasi pada skala rumah tangga melalui elemen seperti kebun mini dan pekarangan vertikal yang dapat diterapkan dalam konteks hunian vertikal.